

## UPAYA PENGEMBANGAN EKONOMI PEDESAAN

Oleh

Sukidjo

### Abstrak

Menurut Sakernas 1976, 81% penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan. Kegiatan ekonomi pedesaan pada dasarnya merupakan kehidupan yang seadanya yang mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam setempat. Kegiatan ekonomi yang dilakukan di daerah pedesaan masih bersifat tradisional, dengan skala usaha yang kecil dan subsisten. Daerah pedesaan memiliki sumber daya alam potensial yang relatif banyak, tenaga kerja yang banyak dan murah. Tersedianya sumber daya alam yang banyak serta tenaga kerja yang murah merupakan faktor yang sangat menguntungkan bagi perkembangan ekonomi daerah yang bersangkutan. Tersedianya jumlah penduduk yang banyak merupakan pasar potensial. Namun demikian, perkembangan ekonomi pedesaan dirasakan masih sangat lambat, walaupun telah tersedia berbagai sarana dan prasarana perhubungan dan komunikasi. Jika dibandingkan dengan perkembangan ekonomi perkotaan, perkembangan ekonomi pedesaan tertinggal jauh. Adanya perbedaan laju perkembangan ekonomi daerah pedesaan dan perkotaan, diduga disebabkan oleh beberapa faktor. Di satu pihak, di daerah perkotaan lebih berkembang kekuatan "*spread effect*" dan sebaliknya kekuatan "*backwash effect*" lebih berkembang di daerah pedesaan. Di lain pihak, disebabkan kurangnya kesempatan masyarakat pedesaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan karena kurangnya pengusahaan asset produksi, rendahnya nilai tukar komoditi serta rendahnya sumber daya manusia di pedesaan. Keadaan ini jika dibiarkan akan mengakibatkan ketidakmerataan ekonomi regional ataupun gap antara perkembangan ekonomi perkotaan dan pedesaan akan semakin besar. Oleh sebab itu, ekonomi pedesaan perlu lebih dikembangkan dan ditingkatkan agar dapat memperkecil gap antara perkembangan ekonomi kota dan desa, sehingga mengalirnya modal ke kota dan urbanisasi dapat dikurangi. Untuk itu, diperlukan kebijaksanaan yang mendasar untuk meningkatkan pemilikan asset produksi masyarakat pedesaan, peningkatan pemilikan sumber daya manusia, peningkatan pemanfaatan teknologi, memberikan bantuan pemasaran dan pengadaan bahan baku serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan.

### **Pendahuluan**

Berdasarkan Sakernas 1976, diketahui bahwa sebanyak 81,36 penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan dan hanya 18,64% yang tinggal di daerah perkotaan. Selain itu diketahui pula bahwa penduduk yang tinggal di daerah pedesaan tidak tersebar secara merata untuk tiap propinsi. Sebagai contoh, penduduk DKI Jakarta seluruhnya penduduk perkotaan, di Kalimantan Timur kurang lebih 60% penduduk pedesaan dan untuk Sulawesi Tengah penduduk pedesaan kurang lebih berjumlah 93% (Sunarto Ndaru Mursito, 1981:205). Ketidakteraturan ini juga terjadi pada tingkat kepadatannya. Desa-desa di Pulau Jawa dan Bali berpenduduk sangat padat, sebaliknya di luar Pulau Jawa dan Bali penduduknya sangat jarang dan pemukimannya terpecah-pecah.

Dalam rangka pembangunan pedesaan, klasifikasi desa dikelompokkan menjadi tiga tipe, yakni desa swadaya, swakarya dan swasembada (Ditjen PMD, 1975 : 6-9). Desa swadaya merupakan kelompok desa yang masih tradisional, dimana adat istiadat masih mengikat. Desa swakarya merupakan desa yang mulai berkembang, dimana adat istiadat telah mulai longgar karena adanya pengaruh dari luar. Sedangkan desa swasembada merupakan desa yang sudah maju. Adat istiadat sudah tidak mengikat, karena berhasilnya pengaruh dari pembaharuan. Adapun sasaran pembangunan desa yang akan dicapai adalah menjadikan semua desa di seluruh wilayah Indonesia memiliki tingkat klasifikasi desa swasembada yang merupakan desa yang berkembang dimana taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Sehubungan dengan itu, yang menjadi obyek pembangunan adalah desa secara keseluruhan yang meliputi segala potensi manusia, potensi alam, teknologi, serta segala aspek kehidupan dan penghidupan yang ada di desa. Oleh karena itu, usaha pembangunan desa harus diarahkan untuk menjadikan desa bukan hanya sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek pembangunan dengan mekanisme sistem perencanaan dari bawah (*bottom up planning*) melalui LKMD di tingkat desa dan UDKP pada tingkat kecamatan (Sayogya dan Pudjiwati Sayogya, 1986 : 136). Namun demikian, banyak faktor yang menghambat pelaksanaan pembangunan ekonomi pedesaan. Salah satunya adalah keadaan sosial budaya masyarakat yang bersangkutan. Menurut Niel Mulder (1973 : 60) dalam masyarakat pedesaan masih terdapat pola pikir yang kurang mendukung kelancaran pembangunan yakni (1) lebih mementingkan bentuk dari pada isi; (2) untuk memulai pembangunan harus menunggu waktu yang baik dan (3) kurang menghargai waktu.

Kenyataan menunjukkan bahwa di desa-desa banyak terdapat bahan-bahan mentah dan tenaga kerja yang murah. Tersedianya bahan-bahan dan tenaga kerja yang murah serta tersedianya sarana perhubungan, komunikasi dan perlistrikan akan sangat menguntungkan bagi perkembangan ekonomi pedesaan. Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi di daerah pedesaan jauh tertinggal jika dibandingkan dengan perkembangan di kota. Persoalannya adalah, mengapa perkembangan ekonomi pedesaan tertinggal jauh dibandingkan dengan perkembangan di kota?, faktor-faktor apa yang menyebabkan perekonomian pedesaan tertinggal?, dan upaya apa untuk mengembangkan ekonomi pedesaan?

### **Ekonomi Pedesaan Merupakan Ekonomi Rakyat**

Dalam memasuki PJP II, masalah ekonomi rakyat banyak mendapatkan sorotan dan perhatian, khususnya yang berkaitan dengan kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan. Diakui sepenuhnya bahwa dalam PJP I, pembangunan yang dilakukan Pemerintah dinilai sangat berhasil. Selain dapat mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun, pendapatan per kapita meningkat dari \$80 pada tahun 1960 naik menjadi \$125 pada tahun 1973, terus naik menjadi \$550 pada th. 1980-an, dan \$650 pada th. 1990-an dan bahkan untuk tahun 1995 diperkirakan mencapai \$920 (Kompas, tgl. 28 Nopember 1995). Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, kemiskinan dapat ditekan secara drastis, yakni dari 54,2 juta atau 40% dari jumlah penduduk pada th. 1976 turun menjadi 27,2 juta atau 15% dari jumlah penduduk pada th. 1990 serta dapat menekan inflasi dari 600% menjadi kurang dari 10% dalam periode yang sama (Lucky W. Sondakh, 1994 : 3).

Namun demikian di balik keberhasilan pertumbuhan ekonomi nasional selama 5 Pelita tersebut, ternyata kurang diikuti oleh perbaikan ketimpangan. Salah satu ketimpangan tersebut adalah ketimpangan spasial, yakni ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Menurut Dumairy (1993 : 61) berdasarkan indikator tingkat melek huruf, imunitasi bayi, status gizi balita, rumah berpenerangan listrik serta indeks mutu hidup, terjadi perbedaan yang cukup mencolok. Persentase penduduk yang berusia 10 tahun ke atas yang melek huruf lebih baik di kota dari pada di desa. Kesehatan bayi dan anak-anak balita di kota lebih baik jika dibandingkan dengan anak-anak balita dan bayi di desa. Kondisi rumah orang-orang kota lebih layak dibandingkan dengan kondisi

rumah orang-orang desa. Demikian juga indeks mutu hidup di kota lebih baik dari pada di desa.

Kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat tampak pada perbedaan pendapatan dan kesejahteraan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Ada kelompok masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang sangat tinggi, sementara itu terdapat pula kelompok masyarakat yang pendapatannya sangat rendah atau dapat dikatakan miskin sekali. Kelompok masyarakat yang pendapatannya sangat rendah ini dialami oleh masyarakat lapisan bawah, yakni golongan ekonomi lemah, para petani kecil, para petani kecil, buruh tani dan sebagainya yang umumnya berada dalam masyarakat pedesaan.

Kegiatan perekonomian masyarakat lapisan bawah merupakan ekonomi rakyat. Ekonomi pedesaan pada dasarnya merupakan ekonomi rakyat. Menurut Ginandjar Kartasasmita (1995 : 17) ekonomi rakyat adalah kehidupan ekonomi 'seadanya' dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam setempat, yang memiliki ciri-ciri (1) bersifat tradisional; (2) skala usahanya kecil dan (3) subsisten. Karena itu, dalam ekonomi rakyat, produksi diarahkan untuk konsumsi sendiri, kegiatan atau usahanya bersifat sekedar untuk bertahan hidup. Jika terdapat kelebihan hasil produksi atas kebutuhannya sendiri, maka kelebihan tersebut akan dijual ke pasar. Dengan demikian produksi belum ditujukan untuk kepentingan pasar.

Sifat tradisional ekonomi rakyat ditandai dengan jenis usahanya melekat pada usaha yang telah dirintis pendahulunya. Bentuk usahanya bersifat perseorangan dan teknologi yang digunakan masih relatif sederhana. Kecilnya skala usaha yang dilakukan disebabkan terbatasnya modal dan peralatan yang digunakan, akibatnya jumlah dan mutu produk yang dihasilkan juga terbatas. Karena itu, usaha perluasan dan peningkatan produksi menjadi terhambat. Keadaan ini akan berdampak hilangnya kesempatan produsen untuk dapat memenuhi tambahan permintaan maupun kenaikan harga produk, sehingga keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh tidak dapat diraih. Oleh karena itu, untuk meningkatkan skala usahanya diperlukan tambahan modal dan perbaikan teknologi.

Sementara itu, sifat subsisten kegiatan usaha ekonomi rakyat nampak bahwa kegiatan produksi diutamakan untuk memenuhi kepentingan konsumsi sendiri dan belum ditujukan untuk kepentingan pasar.

Sehubungan dengan itu, perlu ditingkatkan motivasi agar produk yang dihasilkan diarahkan untuk kepentingan pasar.

### Sebab-sebab Ekonomi Pasar Tertinggal

Menurut para ahli ekonomi yang tergolong dalam Mashab Klasik, apabila kegiatan perekonomian diserahkan kepada "the invisible hand" maka akan tercapai keseimbangan yang stabil (stable equilibrium). Asumsi keseimbangan yang stabil mengandung pengertian bahwa setiap adanya gangguan tertentu terhadap keseimbangan, akan menimbulkan reaksi di dalam sistem yang bersangkutan yang mengarah kepada pemulihan suatu keseimbangan baru. Menurut asumsi ini, suatu sistem perekonomian yang tidak berada dalam keadaan tenang akan selalu bergerak ke arah keseimbangan. Jika asumsi keseimbangan yang stabil ini berlaku sepenuhnya, maka perkembangan ekonomi dari satu daerah dengan daerah lain akan terjadi keseimbangan pula. Perkembangan ekonomi pedesaan dan ekonomi perkotaan seharusnya berada dalam keseimbangan, sehingga perkembangan keduanya akan berjalan secara serasi, dan seimbang. Namun kenyataan yang terjadi tidaklah demikian, dimana kegiatan ekonomi pedesaan tertinggal jauh dibandingkan dengan perkotaan.

Menurut Gunnar Myrdal, dalam kehidupan sosial asumsi keseimbangan yang stabil ternyata kurang realistis, lebih-lebih asumsi yang dinyatakan faktor-faktor non ekonomi sebagai sesuatu hal yang sudah tertentu dan statis. Kenyataannya faktor-faktor non ekonomi tidak dapat dianggap sebagai hal yang sudah tertentu dan statis; apabila faktor-faktor non ekonomi ini bereaksi maka caranya bereaksi biasanya menjauhi keseimbangan. Dalam sistem sosial yang lazim dijumpai apabila terdapat kekuatan yang mengganggu keseimbangan tidak terdapat swastabilisasi yang bersifat otomatis, melainkan kekuatan itu bergerak ke arah yang semakin menjauh (Gunnar Myrdal, 1976 : 36-39). Dengan kata lain terjadinya "kausasi sirkuler" yang menyebabkan proses sosial itu cenderung untuk menjadi kumulatif dan satu sama lain saling mempercepat lajunya proses. Karena proses kausasi sirkuler tersebut, menyebabkan terjadinya ketidakmerataan ekonomi sehingga daerah yang maju akan semakin berkembang dan daerah yang terbelakang akan semakin tertinggal. Oleh sebab itu, ketertinggalan perkembangan ekonomi pedesaan merupakan kewajaran jika dibandingkan dengan perkembangan ekonomi perkotaan.

Dalam kehidupan sosial, khususnya di bidang ekonomi tern lebih berkembang "spread effects" untuk daerah yang sudah maju "backwash effects" untuk daerah yang masih terbelakang. Yang dir sud spread effects adalah kekuatan-kekuatan yang mempunyai peng: positif, pengaruh yang menguntungkan sehingga mendorong ur semakin maju dan berkembang. Sedangkan backwash effects ad. kekuatan-kekuatan yang mempunyai pengaruh negatif, atau peng: yang merugikan sehingga akan menghambat perkembangan yang terj:

Daerah pedesaan merupakan daerah yang perekonomiannya tinggal atau terbelakang dibandingkan dengan daerah perkotaan. Ka itu, justru di daerah pedesaan akan lebih berkembang pengaruh yang rugikan (backwash effects), misalnya; (1) kebiasaan untuk hidup bo antara lain masih banyaknya berbagai upacara selamatan; (2) ada "demonstration effects", yakni meniru pola konsumsi orang kaya a luar negeri pada hal yang bersangkutan sebenarnya belum mam (3) etos kerja rendah, lebih senang bersantai dari pada bekerja keras (4) lebih mengutamakan prestise dari pada prestasi. Di pihak lain, dae pedesaan memerlukan modal yang cukup banyak, yang dapat dica dengan menggiatkan tabungan, tidak boros serta tidak berkonsumsi lebih pendapatannya. Untuk meningkatkan taraf hidup dan memban; daerah diperlukan etos kerja yang tinggi serta mengutamakan presi dari pada prestise. Sementara itu, mereka yang memiliki modal ti tertarik untuak menanamkan modalnya di daerahnya, melainkan me namkan modalnya di daerah perkotaan. Para penduduk desa yang te lulus perguruan tinggi, tenaga kerja yang memiliki keterampilan c keahlian justru pergi dari desa untuk mencari pekerjaan ke kota. Pa hal; untuk mempercepat pembangunan pedesaan diperlukan modal ya cukup serta tenaga kerja yang terampil, namun modal yang ada c tenaga-tenaga kerja yang terampil justru meninggalkan desa dan beke di daerah perkotaan. Akibatnya perkembangan ekonomi pedesa menjadi terhambat.

Sebaliknya daerah perkotaan merupakan daerah yang maj memiliki perekonomian yang lebih berkembang. Tersedianya sarana d prasarana serta majunya perekonomian merupakan daya tarik bagi per lik modal dan tenaga kerja yang terampil. Makin banyaknya penanam modal di daerah perkotaan serta banyaknya tenaga kerja ahli mengal batkan perkembangan perekonomian semakin pesat. Sebaliknya daerah pedesaan, mengalami kekurangan modal dan tenaga kerja ya

terampil akan berakibat perkembangan perekonomian kurang pesat dan relatif tertinggal jika dibandingkan dengan perkembangan perekonomian perkotaan.

Menurut Ginandjar Kartasasmita (1995 : 17) lambatnya perekonomian rakyat disebabkan oleh sempitnya peluang untuk berpartisipasi dalam pembangunan, sebagai akibat dari (1) kurangnya pengusaha dan pemilikan asset produksi terutama tanah dan modal; (2) nilai tukar komoditi yang dihasilkan rendah, dan (3) rendahnya kemampuan sumber daya manusia. Menurut Sensus Pertanian th. 1993, jumlah petani yang memiliki tanah kurang dari 0,50 ha sebanyak 11 juta keluarga, sedangkan pada th. 1983 hanya 10 juta keluarga. Hal ini menunjukkan terjadinya penambahan jumlah petani miskin sebanyak satu juta keluarga dalam satu dekade. Sempitnya tanah yang dimiliki serta kurangnya modal mengakibatkan rendahnya produktivitas dan pendapatan yang diterima. Karena pendapatan rendah, maka tabungan sulit untuk diciptakan sehingga pembentukan modal tidak terlaksana. Keadaan ini menyebabkan mereka tetap mengalami kekurangan modal. Gejala ini tidak hanya dialami pada sektor menghadapi keadaan yang serupa. Akibatnya para petani dan industri dan kerajinan rakyat sulit untuk meningkatkan taraf hidupnya. Nilai tukar komoditi yang dihasilkan oleh usaha rakyat dengan usaha industri besar ternyata rendah. Harga produk usaha industri besar di daerah perkotaan jarang mengalami penurunan harga, bahkan terjadi kecenderungan untuk naik secara kontinyu. Di lain pihak harga produk pertanian dan industri serta kerajinan rakyat di daerah pedesaan sulit untuk naik, bahkan mengalami penurunan secara tajam pada musim panen. Karena itu, surplus pendapatan yang diterima dari usaha ekonomi pedesaan relatif kecil. Sementara itu, rendahnya sumber daya manusia disebabkan tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk pedesaan rata-rata lebih rendah. Secara nasional, kemampuan sumber daya manusia Indonesia masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan negara lain. Dengan menggunakan indikator indeks pengembangan sumber daya manusia (Human Development Index = HDI), negara-negara ASEAN kecuali Philipina mempunyai peringkat 43 dan 54 dengan angka HDI antara 0,778 sampai 0,838 sedangkan Indonesia berada dalam peringkat 105 dengan angka HDI 0,586 (Ginandjar Kartasasmita, 1995 : 17)

### **Berbagai Upaya Pengembangan Ekonomi Pedesaan**

Berdasarkan atas berbagai penyebab keterlambatan perkembangan ekonomi pedesaan yang telah dikemukakan, maka untuk mengembarkan ekonomi pedesaan perlu diupayakan kebijaksanaan yang mendasar guna mempercepat pertumbuhan ekonomi pedesaan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

#### **1. Peningkatan pemilikan asset produksi, khususnya tanah dan modal**

Bagi masyarakat petani, tanah merupakan modal produktif. Karena itu perlu ada kebijaksanaan pemilikan untuk mencegah asidua produksi tanah agar tidak menyempit. Pembagian warisan tanah yang dilakukan secara turun temurun ternyata menyebabkan timbulnya kemiskinan struktural. Untuk mencegah pemecahan tanah pertanian yang semakin meluas, tanah pertanian yang dimiliki ditetapkan minimum dua hektar dan maksimum 20 hektar, baik untuk tanhsawah atau tanah kering. Selain itu diadakan pembatasan-pembatasan bahwa pemindahan hak atas tanah pertanian, kecuali pembagian warisan, dilarang apabila pemindahan hak itu mengakibatkan berlangsungnya pemilikan tanah yang luasnya kurang dari dua hektar (Sudargo Gautama, 1993 : 25).

Dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang atau wilayah telah dikeluarkan undang-undang, yakni UU No.24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Dalam pasal 7, disebutkan bahwa penataan ruang dikelompokkan menjadi tiga macam, yakni:

- a. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan, meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya;
- b. Penataan ruang berdasarkan aspek administratif, meliputi Wilayah Nasional, Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I, Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
- c. Penataan ruang berdasarkan fungsi kawasan dan aspek kegiatan meliputi kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu (UU No.24 th. 1992, ps 7 : 6)

Sehubungan dengan itu, maka pemanfaatan tanah pertanian untuk pembangunan industri, perkantoran, pemukiman dan fasilitas umum hendaknya tetap berpegang teguh pada undang-undang tata ruang tersebut, sehingga dapat dihindarkan semakin sempirnya lahan pertanian yang subur.

Kendala lain yang dihadapi pelaku ekonomi pedesaan adalah kekurangan dana untuk modal usaha. Oleh karena itu perlu tersedi-

nya kredit, mengingat rendahnya tabungan yang dapat diwujudkan, berhubung pendapatan yang diperoleh relatif rendah. Dengan tersedianya kredit maka diharapkan dapat meningkatkan produksi, pendapatan dan surplus usaha sehingga memungkinkan terjadinya tabungan dan pembentukan modal. Kredit yang disediakan hendaknya sesuai dengan kebutuhan usaha serta tepat waktu. Tidak kalah pentingnya, perlunya penyuluhan dan pengarahan dalam menggunakan kredit, sehingga kredit yang diambil benar-benar digunakan untuk kegiatan yang bersifat produktif.

## 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Untuk kepentingan peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan antara lain dengan cara: (1) pendidikan, penyuluhan, penataran dan latihan kewiraswastaan. Dengan pendidikan ini diharapkan akan dapat ditingkatkan pengetahuan, keterampilan, jiwa kewiraswastaan serta etos kerja; (2) sistem magang atau latihan, dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman serta keterampilan; (3) sistem bapak angkat, dimaksudkan untuk memperoleh bimbingan serta mendapatkan kemudahan dalam pengadaan bahan baku maupun pemasaran.

## 3. Peningkatan teknologi

Teknologi mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan produktivitas. Dengan adanya perbaikan teknologi maka jumlah dan mutu produk dapat ditingkatkan serta memungkinkan diadakan diversifikasi produk. Dengan meningkatnya jumlah dan mutu produk akan dapat memperluas pemasaran yang akhirnya pendapatan yang diterima akan meningkat pula. Mengingat kualitas sumber daya manusia masyarakat pedesaan pada umumnya masih rendah, maka teknologi yang diterapkan pada kegiatan ekonomi pedesaan bukanlah teknologi tinggi yang rumit ataupun teknologi yang padat modal, melainkan teknologi tepat guna dan padat tenaga kerja.

#### 4. Bantuan pemasaran dan bahan baku

Kelancaran pemasaran merupakan faktor yang sangat menentukan kesinambungan kegiatan produksi. Kegiatan produksi akan mengalami hambatan apabila tidak didukung oleh kelancaran pemasaran. Produsen akan menderita kerugian apabila produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan. Oleh sebab itu, tidak mengherankan banyak produsen yang bersedia mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk memperlancar pemasaran.

Barang-barang yang dihasilkan di pedesaan pada umumnya berupa barang-barang hasil pertanian, peternakan, industri kecil dan kerajinan rakyat. Barang-barang ini pada umumnya belum mempunyai pasar yang luas maupun harga yang mantap. Untuk produk pertanian harga mengalami penurunan pada musim panen sedangkan biaya produksi menunjukkan kenaikan. Demikian juga untuk peternakan, terdapat kecenderungan harga bahan-bahan mengalami kenaikan sedangkan harga produknya tidak menentu. Akibatnya penghasilan yang diterima produsen kurang menguntungkan. Masalah pemasaran sangat dirasakan oleh produsen pertanian, industri kecil dan kerajinan rakyat. Oleh sebab itu, guna mendorong dan mengembangkan sektor ini, perlu adanya bantuan pemasaran. Bantuan pemasaran ini dapat dilakukan dengan cara, antara lain: (1) penataan sistem bapak angkat; (2) mendirikan pusat-pusat pemasaran; (3) menyelenggarakan pameran produk; (4) mendirikan atau menetapkan perusahaan pengolah dan pemakai produk yang bersangkutan; (5) meningkatkan kerjasama dengan badan usaha atau koperasi; (6) adanya kebijaksanaan yang berupa aturan atau himbauan untuk menggunakan produk yang bersangkutan dan (7) mencarikan pasar baru termasuk memasarkan ke luar negeri.

Selain masalah pemasaran, kendala yang dihadapi produsen di daerah pedesaan adalah kesulitan untuk mendapatkan bahan baku. Belum adanya koordinasi dalam pengadaan bahan-bahan yang diperlukan mengakibatkan harga bahan-bahan menjadi naik serta di lain pihak kontinuitas penyediaan bahan baku kurang terjamin. Oleh sebab itu, perlu ada upaya untuk menjamin pengadaan bahan baku secara kontinyu dengan harga yang wajar.

5. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan di pedesaan

Guna mengurangi arus mengalirnya modal dan tenaga kerja terampil dan ahli dari desa ke kota, maka di pedesaan perlu diciptakan pusat pertumbuhan. Dengan cara mendirikan pusat-pusat perdagangan, terminal ataupun perusahaan dapat dipandang sebagai sarana pusat pertumbuhan. Dengan adanya pusat-pusat pertumbuhan tersebut permintaan tenaga kerja dan modal kiranya meningkat, sehingga tenaga kerja dan modal yang ada dapat tertampung di daerah pedesaan yang bersangkutan. Dengan demikian urbanisasi dapat dicegah. Dengan adanya pusat pertumbuhan di pedesaan, maka kegiatan ekonomi pedesaan akan terangkat untuk berkembang. Selain itu perlu digalakkan "gerakan kembali ke desa" guna menciptakan "kota sedang" atau "kota kecil" (Priyono Tjiptoherijanto, 1994 : 65). Dengan adanya pusat pertumbuhan diharapkan gerakan kembali ke desa akan berjalan lancar dan di lain pihak dapat menimbulkan pengaruh positif (*spread effects*) sehingga kegiatan ekonomi pedesaan akan semakin berkembang.

**Penutup**

Guna meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan perlu adanya upaya untuk mengembangkan ekonomi pedesaan. Upaya pengembangan tersebut dimaksudkan untuk mengubah ekonomi pedesaan dari ekonomi tradisional menuju ekonomi modern, dari ekonomi lemah menjadi ekonomi yang tangguh, dari ekonomi subsisten menjadi ekonomi yang berorientasi kepada pasar, dari kedudukan ekonomi yang bergantung menjadi ekonomi yang mandiri. Kebijakan yang ditempuh sebaiknya bersifat mendasar dan tidak hanya bersifat tamal sulam. Untuk keperluan tersebut, pemerintah harus tampil ke depan mengambil peran aktif dalam mengembangkan ekonomi pedesaan, melalui usaha peningkatan asset produksi, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan teknologi, pemberian bantuan pemasaran dan pengadaan bahan baku, serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru.

**Daftar Pustaka**

- Depdagri, Ditjen PMD. 1975. *Peranan Pembangunan Masyarakat Desa Dalam Pelita II*. Jakarta: Panitia Wisuda IV Institut Ilmu Peme-rintahan.
- Dumairy. 1993. *Ketimpangan Pembangunan: Sebuah Potret Untuk Pelajar PROSPEKTIF*, Volume 5 Nomor 1 dan 2 th. 1993. Yogyakarta: PP UGM.
- Ginandjar Kartasasmita. 1995. *Kepemihakan Pembangunan Nasional Dalam Meningkatkan Kemampuan Perekonomian Rakyat* PIP, No.145 Th X 1995. Jakarta: Dekopin.
- Gunnar Myrdal. 1976. *Bangsa Bangsa Kaya dan Miskin* (terj.: Paul Sihotan, Jakarta: Gramedia.
- Lucky W Sondakh. 1994. *Pembangunan Daerah dan Perekonomian Rakyat* PRISMA, No. 8 Th. XXIII Agustus 1994. Jakarta: LP3ES.
- Niel Mulder. 1973. *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional*. Yogyakarta: "Gadjahmada University Press.
- Prijono Tjiptoherijanto. 1994. *Gerakan Kembali Ke Pedesaan* PRISMA, No. Th. XXIII Mei 1994. Jakarta: LP3ES.
- Sayoga dan Pudjiwati Sayoga. 1986. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Sudargo Gautama. 1993. *Tafsiran Undang Undang Pokok Agraria*. Bandung Citra Aditya Bakti.
- Sunarto Ndaru Mursito. 1981. *Gambaran Umum Tentang Pembangunan Pedesaan di Indonesia* ANALISA, No. 3 Maret 1981. Jakarta: CSIS.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992. *Tentang Penataan Ruang*.